

KENAIKAN TARIF DASAR LISTRIK DAN UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI LISTRIK

Nidya Waras Sayekti^{*)}



Abstrak

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 15% pada 2013 merupakan salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan energi listrik di negara ini. Kebijakan pemerintah tersebut di satu sisi dapat mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk subsidi energi, namun di sisi lain juga dapat melemahkan dunia usaha. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji kenaikan TDL dan memikirkan lebih jauh pembangunan infrastruktur energi dalam menghasilkan listrik dengan mengoptimalkan sumber daya panas bumi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan energi listrik nasional.

A. Pendahuluan

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 15% pada 2013 secara bertahap yang sudah berlangsung awal tahun ini mengundang perdebatan di kalangan publik. Sebagian pihak yang setuju dengan kebijakan ini menyatakan alasannya bahwa besaran subsidi listrik sudah terlampaui tinggi sehingga membahayakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal lain yang mendorong dikeluarkannya kebijakan ini adalah adanya Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa kondisi PLN pada 2009 – 2010 mengalami kerugian sebesar Rp36 triliun.

Sementara itu, pihak yang menolak kenaikan TDL beralasan banyak pengusaha kecil yang dirugikan. Kenaikan TDL bisa

menyebabkan daya saing industri kecil dalam negeri melemah sehingga berdampak terhadap etintas-etintas lain, misalnya industri manufaktur. Kalangan pengusaha meminta kenaikan TDL untuk ditunda tahun depan karena tahun ini para pengusaha baru menghadapi beban kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sangat tinggi yaitu, lebih dari 44%. Hal tersebut dapat melemahkan dunia usaha. Meskipun pemerintah berjanji tidak menaikkan tarif untuk pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA, namun banyak industri kecil saat ini yang menggunakan daya di bawah 1.300 VA, artinya bahwa industri kecil tetap akan terkena dampak dari kenaikan TDL ini.

Kebijakan pemerintah dalam menaikkan TDL merupakan salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan energi listrik di negara

^{*)} Peneliti bidang Ekonomi Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: nidya_ws@yahoo.com



ini. Namun, terlepas dari semua itu, yang menjadi permasalahan besar adalah biasanya kenaikan TDL maupun Bahan Bakar Minyak (BBM) selalu diikuti dengan naiknya harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar mengkaji kenaikan TDL dan memikirkan lebih jauh pembangunan infrastruktur energi dalam menghasilkan listrik, baik itu dalam pemanfaatan energi alternatif atau bukan. Hal ini bertujuan agar biaya produksi listrik menjadi lebih murah dan tepat sasaran. Di samping itu, PLN seyogyanya juga secara berkelanjutan melakukan pembenahan internal dengan sebaik-baiknya, melakukan efisiensi di berbagai pos pengeluaran sehingga secara eksternal dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dukungan masyarakat juga diperlukan, salah satunya dengan menggunakan listrik sehemat-hematnya.

B. Upaya Pemenuhan Kebutuhan Energi Listrik

Kenaikan TDL sebesar 15% ternyata belum bisa menjamin pasokan listrik bebas dari pemadaman. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan energi listrik adalah dengan rencana pembangunan 4 (empat) Gardu Induk (GI), yakni 2 unit di Sumatera, 1 unit di Jawa, dan 1 unit di Sulawesi. Sangat disayangkan pembangunan infrastruktur energi ini tidak terealisasi pada 2012. Terhambatnya pembangunan keempat GI tersebut dikarenakan PT PLN tidak mampu menyerap dana APBN 2012 yang sudah tersedia untuk kepentingan tersebut.

Menurut Direktur Perencanaan dan Konstruksi PT PLN Nasri Sebayang, persoalan di bidang rasio elektrifikasi adalah pembangunan infrastruktur di bidang ketenagalistrikan, sesuai UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan harus terintegrasi mulai pembangkit, transmisi, jaringan distribusi, hingga ke *end user*.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Ketenagalistrikan No, KP01/KPA/600.2/2012 tentang Rencana Umum Pengadaan Pembangunan

Jaringan Transmisi, Gardu Induk, Jaringan Distribusi dan gardu Distribusi, serta Program Listrik Murah Tahun Anggaran 2012, Rp502 miliar dialokasikan untuk pembangunan induk jaringan, yang terdiri dari pembangunan GI, transmisi, dan jaringan. Adapun untuk listrik pedesaan dialokasikan Rp2,54 triliun.

Nasri mengakui, dari total dana itu, PLN hanya dapat menyerap separuh anggaran yang ditetapkan. Penyebabnya ialah banyak kendala di lapangan, khususnya masalah pembebasan lahan. Ia berharap pembangunan GI dapat selesai pada 2014. Namun berdasarkan ketentuan APBN, proyek itu hanya berlaku satu tahun anggaran dan tidak berlaku tahun jamak atau *multiyears*. Alternatifnya, proyek tersebut bisa berlanjut setelah diajukan lagi pada APBN perubahan atau menggunakan dana Anggaran PLN (APLN).

Di sisi lain, Manajer PLN Balikpapan Ismail Deu menyatakan belum bisa memastikan tidak akan terjadi pemadaman bergilir selama 2013 karena banyak faktor, seperti tahun lalu terjadi 285 kali pemadaman karena ada pemasangan sebagian peralatan akibat gangguan cuaca, seperti tanah longsor. Pemadaman bergilir juga masih sering terjadi di Kota Palembang dan kabupaten-kabupaten lain di Sumatera Selatan, seperti di Kabupaten Pagaralam dalam sehari terjadi 10 kali pemadaman. Di Garut Jawa Barat, warga mengeluh setiap Senin dan Kamis Puasa

Tabel Proyek Pelistrikan yang Belum Selesai

No.	Paket Pekerjaan	Biaya (Rp miliar)	Lokasi
1.	Pembangunan 3 SUTT 150 kV dan 1 GI 150 kV.	264,81	Kalimantan
2.	Pembangunan 9 GI 150 Kv	94,66	Sulawesi, Maluku, dan Papua
3.	Pembangunan 2 SUTT 150 kV, 1 UGC 150 kV, 1 GITET 500 kV, 2 GI 150 kv, dan 1 GIS 150 kV.	84,85	Jawa dan Bali
4.	Pembangunan 1 SUTT 150 kV dan 2 GI 150 Kv	60,90	Sumatera
5.	Pembangunan jaringan distribusi, GI, dan program listrik murah	2.548,19	Seluruh Indonesia

Sumber: PLN/Tim Riset Media Indonesia

Keterangan:

GITET: Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi

SUTT: Saluran Udara Tegangan Tinggi

UGS: *Underground Cable*

GIS: *Gas Insulated Substation Extension*

listrik, bahkan 40 ribu warga belum dapat aliran listrik.

Pengamat kelistrikan Fabby Tumiwa menilai dalam proses pembangunan keempat proyek semestinya dibuat aturan pelaksanaan lebih terperinci, harus ada evaluasi setiap tahun, bagaimana metodologi dan prosesnya, serta harus ada sanksi terhadap PLN jika pembangunan tidak sesuai. Sedangkan menurut Anggota Komisi VII DPR RI, Alimin Abdullah menilai tidak terealisasinya GI itu lebih disebabkan permasalahan profesionalitas, ada sesuatu yang *misprogram* dan *misplanning*. Karena, apabila melihat data Ditjen Ketenagalistrikan menunjukkan dalam tiga tahun terakhir realisasi pembangunan proyek itu memang mengecewakan. Pada 2010 realisasi proyek itu hanya mencapai 68,3%, tahun 2011 menjadi 42%, dan pada 2012 mencapai 44,66%. Padahal kinerja PLN atas proyek yang sama pada 2008 dan 2009 jauh lebih baik, yakni mencapai masing-masing 98% dan 95%.

Sedangkan menurut Manajer Senior Komunikasi PT PLN (persero), Bambang Dwiyanto, pihaknya tidak mengurus masalah kenaikan TDL yang saat ini tengah dikeluhkan konsumen. Menurutnya, ada atau tidak ada kenaikan tarif, upaya peningkatan pelayanan tetap dilakukan karena domain PLN adalah pelayanan listrik. Pemadaman listrik oleh PLN akan ditekan semaksimal mungkin, sebagai contoh angka SAIDI (*System Average Interruption Duration Index*) dan SAIFI (*System Average Interruption Frekuention Index*) terus menurun dari tahun ke tahun. Adapun SAIDI dan SAIFI adalah indikator rata-rata lama padam dan frekwensi padam per pelanggan sesuai standar *benchmark industry* kelistrikan internasional.

Kenaikan TDL merupakan domainnya pemerintah dalam rangka pengurangan subsidi energi khususnya subsidi listrik yang diperkirakan pada tahun 2013 mencapai Rp93,52 triliun. Hal ini dilakukan karena Pemerintah membutuhkan dana untuk melakukan pembangunan infrastruktur lainnya termasuk perluasan jaringan listrik untuk menerangi 25% warga Indonesia yang sampai saat ini belum menikmati listrik. Untuk itu, pemerintah melalui Nota Keuangan Presiden RI tanggal 29 Agustus 2012 tentang RAPBN 2013, menyebutkan bahwa besaran subsidi listrik tahun 2013 sekitar Rp78,63 triliun sehingga diperlukan adanya penyesuaian terhadap tarif listrik. Disebut penyesuaian, karena tidak

semua mengalami kenaikan dan agar tujuan subsidi tepat sasaran.

Ia menambahkan tertundanya proyek pembangunan GI merupakan kewenangan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan dana APBN. Sedangkan PLN bertugas melaksanakan proyek kelistrikan yang sumber dananya berasal dari APLN.

Menanggapi hal itu, Dirjen Ketenagalistrikan ESDM, Jarman, mengakui bahwa untuk kinerja unit proyek induk, terutama GI dan transmisi memang tidak tercapai karena soal pertanahan, tapi program listrik perdesaan tercapai 90% secara fisik.

Selain pembangunan GI yang belum selesai, dalam rangka pemenuhan pasokan energi listrik, pemerintah telah meresmikan dua proyek panas bumi yakni Pembangkit Listrik Panas Bumi Kamojang Unit 5 di Garut (Jawa Barat) berkapasitas 30 MW, dan pengembangan Lapangan Panas Bumi Lahendong (Sulawesi Utara) untuk suplai uap ke PLTP Unit 4 Lahendong. Dua proyek yang dioperasikan PT Pertamina Geothermal Energy ini merupakan bagian dari tekad Pertamina mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan, terutama yang bersumber dari panas bumi.

Indonesia tercatat sebagai negeri yang menyimpan 40% dari potensi panas bumi dunia. Posisi yang di kelilingi gunung api telah memberikan potensi panas bumi yang mampu membangkitkan listrik hingga sekitar 29.000 megawatt dan sekitar 22 persen atau 6.096 MW berada di Jawa Barat. Namun kapasitas yang baru terpasang hanya sebesar 1.226 MW atau 4% dari total potensi. Tahun ini, pemerintah hanya berani menargetkan pemanfaatan panas bumi menjadi 6 persen dan hingga tahun 2014, Kementerian ESDM menargetkan 7-8% dari potensi panas bumi sudah dieksploitasi. Padahal dengan memanfaatkan energy panas bumi, subsidi energi bisa ditekan. Dalam APBN 2013, subsidi energy Rp274,7 triliun. Sebagai perbandingan, tarif khusus listrik berbasis panas bumi yang ditetapkan pemerintah 10 – 17 sen USD per kWh untuk kontrak baru. Adapun biaya pokok penyediaan listrik untuk pembangkit yang memakai BBM lebih dari 26 sen dollar AS per kWh.

Untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan tersebut, perlu kebijakan yang menyeluruh dan konsisten dari pemerintah.

Selain mempermudah perizinan proyek panas bumi, perlu kebijakan semestinya mulai mengalihkan dana subsidi untuk pengembangan panas bumi dan jenis energi baru terbarukan lainnya.

C. Penutup

Kebijakan pemerintah menaikkan TDL sebesar 15% pada tahun 2013 merupakan salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan energi listrik di negara ini. Di satu sisi pemerintah bermaksud mengurangi subsidi listrik yang menjadi beban APBN, namun di sisi lain dapat menyebabkan daya saing industri kecil dalam negeri melemah. Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar mengkaji kenaikan TDL dan memikirkan lebih jauh pembangunan infrastruktur energi dalam menghasilkan listrik, baik itu dalam pemanfaatan energi alternatif atau bukan.

Salah satu alternatif solusinya dalam memenuhi kebutuhan energi listrik adalah dengan pemanfaatan energi panas bumi yang baru dieksploitasi sebesar 4% dari potensi yang dimiliki oleh Indonesia sehingga subsidi energi yang membebani APBN dapat ditekan. Oleh karena itu, DPR perlu mendorong pemerintah untuk segera mengoptimalkan sumber daya panas bumi guna dimanfaatkan untuk penyediaan energi listrik.

Rujukan:

1. "Penaikan TDL Perlu Dikaji Ulang," Media Indonesia, 14 Januari 2013.
2. "Tarif Naik, Listrik Tetap Byarpet," Media Indonesia, 14 Januari 2013.
3. "Segera Evaluasi Kinerja Proyek Gardu Induk PLN," Media Indonesia, 15 Januari 2013.
4. "Kenaikan Tarif Listrik bukan Urusan PLN," <http://www.metrotvnews.com/>, diakses 15 Januari 2013.
5. "Pengusaha Minta Kenaikan Listrik dan Gas Ditunda Tahun Depan," <http://finance.detik.com/>, diakses 15 Januari 2013.
6. "Panas Bumi Dihalangi, Potensi Listrik Panas Bumi Indonesia 29.000 Megawatt," Kompas, 14 Januari 2013.
7. "Energi Panas Bumi, Perlu Konsistensi," Kompas, 15 Januari 2013.